

## ABSTRAK

Skripsi ini diawali dengan adanya fakta bahwa selama 2012 hingga 2017 Indonesia belum memberikan sikap lugas pada Myanmar terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya yang berdampak pada keamanan ASEAN ini. Namun setelah gerakan #saverohingya menjadi *trending topic* di media sosial Twitter, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi langsung melakukan kunjungan ke Myanmar yang kemudian memberikan sikap lugas dengan mengusulkan kebijakan 4+1 dalam misi mediasi kasus krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

Skripsi ini memberikan penjelasan tentang bagaimana proses gerakan politik yang dibangun melalui media sosial Twitter oleh masyarakat dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam pengambilan sikap politik luar negeri dengan menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menekankan pada gagasan utamanya yakni *shared idea* dan *shared understanding*. Argumen pokok penelitian ini didukung dengan data kuantitatif yang diperoleh melalui bantuan software aplikasi Twittonomy. Media sosial yang semula dibangun sebagai alat pergaulan, kini menjadi salah satu *platform* yang memiliki *power* untuk mendorong adanya sikap politik dari pemerintah.

Argumen ini dibuktikan dengan adanya *shared idea* bahwa Indonesia harus membantu pengungsi Rohingya karena merupakan saudara muslim melalui tagar #saverohingya berhasil diterima oleh masyarakat yang dilihat melalui *engagement* dan respon dari *netizen* Twitter. Setelah demonstrasi #saverohingya pada 2017, pemerintah Indonesia lebih peduli dan tegas pada isu tersebut, tuntutan yang diberikan oleh masyarakat melalui media sosial diproses dan menjadi referensi pembuatan kebijakan yang diproyeksikan melalui sikap negara yang mencerminkan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** Twitter, Rohingya, Gerakan Politik, Hashtag, Konstruktivisme